

## Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan BUMN

Muslim Al Kautsar  
Achmad Fadjar

### ABSTRACT

*In Indonesia, a phenomenon that occurs indicates that the performance of SOEs in general have not shown that optimal performance among many SOEs have low performance and management difficulties (SOE performance report, 2007).*

*This study aims to analyze the effect of ownership structure and corporate governance of SOEs financial performance. The research was conducted on state-owned enterprises going public is headquartered in West Java which numbered as many as six state-owned enterprises in the period of 2009.*

*The research has been done by using multiple linear regression statistical test showed that the ownership structure and corporate governance simultaneous positive effect on the financial performance of SOEs going public is headquartered in West Java with the influence of 78.3%. While partially showing ownership structure and corporate governance, each having a positive impact on financial performance.*

**Keywords:** ownership structure, corporate governance, financial performance

### PENDAHULUAN

#### Latar belakang

Badan Usaha Milik Negara sebagai salah satu pilar dalam perekonomian Indonesia merupakan entitas ekonomi yang harus menjadi perhatian utama dalam memajukan Indonesia. Dalam perkembangannya BUMN saat ini memangku lima amanah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 yaitu (1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Negara (2) mengejar keuntungan (3) menyelenggarakan kemanfaatan umum (4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi (5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Di Indonesia, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa kinerja BUMN pada umumnya belum memperlihatkan kinerja yang optimal diantaranya masih banyak BUMN yang mempunyai kinerja rendah dan mengalami kesulitan manajemen (laporan kinerja BUMN, 2007). Fenomena belum optimalnya kinerja BUMN dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, kinerja BUMN selama periode tahun 2003 – 2007 dilihat dari nilai ROA dan ROE memberikan angka pencapaian yang belum optimal. Faktor inefisiensi dinilai merupakan faktor penyebab kinerja BUMN yang buruk. Kedua, dilihat dari perkembangan laba bersih pada BUMN selama periode 2003 – 2007, menunjukkan adanya peningkatan yang belum optimal. Dan peningkatan tersebut relatif tidak signifikan atau relatif berfluktuatif. Ketiga, adanya fenomena kegagalan dalam pengelolaan BUMN, dengan kata lain masih rendahnya *good corporate governance* (GCG) dalam BUMN. Indikasi rendahnya GCG tersebut tercermin dari hasil audit terhadap GCG yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap 16 BUMN di Indonesia pada tahun 2003. Dari 16 BUMN yang diaudit hanya 6 (enam) BUMN yang masuk kategori baik sedangkan 10 (sepuluh) BUMN yang masuk kategori cukup dan tidak ada satupun BUMN yang masuk kategori sangat baik.

Menurut penelitian Simon Wong (2006) sebagian besar BUMN di negara berkembang memiliki kelemahan *governance*. Kelemahan tersebut antar lain masalah *agency problem* yang menyebabkan intervensi pemerintah dalam pengelolaan BUMN cukup tinggi. Disamping itu hak manajemen BUMN untuk mengelola perusahaan dengan bebas sering dikebiri karena kebanyakan pimpinan BUMN dipilih berdasarkan kedekatan politik sehingga tidak bisa tampil mandiri. Disamping itu terdapat masalah terkait dengan minimnya alat (tools) untuk memberikan intensif dan mendisiplinkan manajemen BUMN. Kelemahan dari sisi *governance* ini membuat kinerja BUMN menjadi tidak kompetitif

Penelitian lebih lanjut dari Meggison dan Nash (2005) juga menunjukkan bahwa privatisasi BUMN telah mampu membangun praktek GCG lebih baik yang pada akhirnya memicu perbaikan kinerja. Kecenderungan utama yang terjadi setelah privatisasi adalah perubahan kepemilikan (ownership), dimana lebih besar saham pemerintah yang dilepaskan maka manajemen BUMN lebih leluasa dan akan lebih fokus kepada tujuan profit. Apabila dilakukan dengan cara listing di pasar modal, maka kewajiban transparansi dan *disclosure* harus dilakukan, sehingga GCG semakin kuat dilaksanakan.

#### Identifikasi masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Apakah struktur kepemilikan dan *good corporate governance* berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan BUMN
2. Apakah struktur kepemilikan dan *good corporate governance* berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan BUMN

## TINJAUAN PUSTAKA

### Struktur Kepemilikan

Menurut UU No. 19, Tahun 2003 Tentang BUMN, privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Dengan adanya privatisasi berarti struktur kepemilikan BUMN menjadi berubah, dimana kepemilikan pemerintah menjadi berkurang dengan penjualan saham kepada pihak lain. Selanjutnya peran swasta makin meningkat sedangkan peran pemerintah makin berkurang.

Secara spesifik perubahan struktur kepemilikan di BUMN di seluruh dunia pada dasarnya didorong oleh dua motivasi. *Pertama* keinginan menaikkan efisiensi karena buruknya kinerja sebagian BUMN. *Kedua* secara empiris dapat dibuktikan bahwa perubahan struktur kepemilikan BUMN bisa dimaksudkan untuk membantu anggaran pemerintah dari tekanan defisit (Prasetiantono ;2005). Struktur kepemilikan pada BUMN sebagai akibat dari adanya privatisasi dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu (1) kepemilikan pemerintah dan (2) kepemilikan non pemerintah yang terdiri dari kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi, kepemilikan asing dan kepemilikan publik.

Beberapa hasil penelitian [Megginson, Nash, dan Van Randenborgh (1994), Boubakri dan Cosset (1998), dan D'Souza dan Megginson (1999)] mengatakan bahwa Implikasi pertama dari privatisasi BUMN adalah terjadinya perubahan komposisi kepemilikan BUMN yang menyebabkan BUMN perlu melakukan redefinisi misi dan tujuan perusahaan. Ketika BUMN belum dilakukan privatisasi, kepemilikan BUMN 100% adalah milik pemerintah yang biasanya misi dan tujuan BUMN sangat banyak, mulai dari tujuan sosial, *agent of development*, sampai dengan misi bisnis, sehingga BUMN tidak fokus, dan bahkan berpotensi terjadinya konflik kepentingan dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan privatisasi, BUMN akan lebih fokus pada pencapaian profit. Namun demikian, seperti ditunjukkan oleh beberapa hasil penelitian, fokus pada pencapaian profit ini sangat tergantung pada komposisi kepemilikan BUMN. Boycko, Shleifer, dan Vishny (1996) memprediksi bahwa BUMN akan lebih fokus pada pencapaian profit, sehingga manfaat privatisasi untuk peningkatan efisiensi operasi dapat diperoleh, jika pemerintah mulai melepas kepemilikan BUMNnya dan menyerahkannya pada swasta.

Senada dengan pendapat Boycko, Shleifer, dan Vishny tersebut, Claessens (1997) menyatakan bahwa jika kepemilikan pemerintah pada BUMN masih mayoritas, maka biasanya BUMN akan menunda untuk melakukan restrukturisasi dan pengurangan karyawannya. Ini yang menyebabkan BUMN tidak efisien. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian empiris mengenai pengaruh privatisasi pada kinerja keuangan BUMN, seperti yang dilaporkan oleh D'Souza dan Megginson (1998), Boubakri dan Cosset (1998), Eckel, Eckel, dan Singal (1997), dan Megginson, Nash, dan Van Randenborgh (1994), bahwa efisiensi yang sangat signifikan pada BUMN sesudah privatisasi hanya terjadi bila kepemilikan pemerintah pada BUMN semakin berkurang.

### Good Corporate Governance

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, maka ditetapkan bahwa "*Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika, sedangkan *stakeholders* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung yaitu pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, direksi dan karyawan serta pemerintah, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dikemukakan pula oleh *National Committee Governance* (NCG ; 2006). Prinsip-prinsip NCG hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Menteri Negara BUMN melalui keputusan Menteri BUMN No 117/M-MBU/2002 menyebutkan lima prinsip *good corporate governance*. Penjelasan singkat atas masing-masing prinsip tersebut sebagai berikut :

1. Prinsip transparansi (prinsip keterbukaan), artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Prinsip akuntabilitas (Accountability) yaitu prinsip adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan (*financial statement*) yang dapat dipercaya.
3. Kewajaran (*fairness*) merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, investor) maupun pemangku kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat dan lainnya). Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan penggajian dan peraturan perundang-undangan.

4. Prinsip Pertanggungjawaban (prinsip Responsibility) adalah kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan perusahaan terhadap peraturan perundang undangan dan prinsip prinsip korporasi yang sehat. Prinsip dimana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya.
5. Prinsip Kemandirian (*Independency*) sebagai suatu keadaan dimana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan. Dan bebas dari tekanan/pengaruh dari mana pun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.

#### **Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Manajemen perusahaan seharusnya berusaha semaksimal mungkin untuk memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*). Keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan dapat dilihat dari tingkat kinerja perusahaan. Purwadarmita (2007) mengemukakan bahwa kinerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu usaha. Pabudu (2008) mengungkapkan bahwa kinerja sebagai hasil – hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai factor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.

Amstrong dan Baron yang dikutip oleh Wibowo (2008) mendefinisikan kinerja perusahaan yaitu hasil kerja atau prestasi kerja, yang mempunyai makna lebih luas bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Dikemukakan oleh Venti (2007), sebenarnya titik akhir dari kinerja dapat dilihat dari kinerja keuangan, dengan asumsi bahwa kinerja keuangan yang dibuat sesuai bukan hasil dari rekayasa. Parameter yang sering digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja suatu perusahaan adalah dengan menggunakan pendekatan keuangan dimana informasinya diambil dari laporan keuangan atau sumber laporan keuangan lainnya.

Penilaian kinerja BUMN menurut Kepmen BUMN Nomor Kep 100/MBU/2002 meliputi *Return of Equity, Return of Asset, dan Net Profit Margin*. Rasio-rasio tersebut pada umumnya digunakan pula oleh para peneliti untuk mengukur kinerja BUMN diantaranya Syamsudin Zakarsyi (2008), Moerhadi (2005). Adapun uraian masing-masing rasio-rasio kinerja tersebut antara lain :

1. *Return of Equity (ROE)*.

ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola kapital yang tersedia untuk mendapatkan net income. Bagi manajemen perusahaan yang mampu meningkatkan *return on equity* biasanya ada petunjuk tentang kemampuan manajemen perusahaan yang bersangkutan dalam menaikkan incomenya. indikator yang digunakan *Net Income* dan *Equity Capital*

2. *Return to Total Assets (ROA)*.

Kemampuan manajemen dalam menghasilkan income dari pengelolaan asset yang dimilikinya. Indikator yang digunakan *Net Income* dan *Total Assets*.

3. *Net Profit Margin*.

Margin laba bersih yang membandingkan jumlah pendapatan dengan jumlah penjualan bersih juga merupakan ukuran kinerja operasional yang mengindikasikan kinerja perusahaan dalam jangka pendek (selama setahun). Indikator yang digunakan *Net Income* dan *Operating Income*

#### **Kerangka Pemikiran**

Maksud dilakukannya privatisasi BUMN antara lain untuk memperluas kepemilikan masyarakat atas persero dan menciptakan struktur keuangan yang kuat/baik (UU BUMN No 19, pasal 74, 2003). Struktur keuangan yang kuat dapat pula ditinjau dari struktur kepemilikan, proporsi kepemilikan yang lebih besar dari proporsi hutang, akan mengakibatkan rasio hutang atas ekuitas (*Debt to equity ratio*) menjadi relatif rendah. Perusahaan yang memiliki rasio hutang atas ekuitas relatif rendah, struktur permodalannya relatif baik. Adapun perluasan kepemilikan masyarakat, merupakan strategi pendanaan tidak melalui hutang, tetapi melalui transfer kepemilikan kepada masyarakat. Transfer kepemilikan tersebut akan mengurangi dominasi kepemilikan pemerintah, akibat adanya kepemilikan masyarakat ada pengendali perusahaan selain pemerintah dan manajemen BUMN, sehingga diharapkan privatisasi BUMN dapat menciptakan efisiensi dan berdaya saing.

Boycko, Shleifer, dan Vishny tersebut, Claessens (1997) menyatakan bahwa jika kepemilikan pemerintah pada BUMN masih mayoritas, maka biasanya BUMN akan menunda untuk melakukan restrukturisasi dan pengurangan karyawannya. Ini yang menyebabkan BUMN tidak efisien. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian empiris mengenai pengaruh privatisasi pada kinerja keuangan BUMN, seperti yang dilaporkan oleh D'Souza dan Megginson (1998), Boubakri dan Cosset (1998), Eckel, Eckel, dan Singal (1997), dan Megginson, Nash, dan Van Randerborgh (1994), bahwa efisiensi yang sangat signifikan pada BUMN sesudah privatisasi hanya terjadi bila kepemilikan pemerintah pada BUMN semakin berkurang. Berdasarkan temuan empiris ini, saya ingin menguji kembali apakah terdapat pengaruh struktur kepemilikan non pemerintah terhadap perubahan peningkatan kinerja keuangan BUMN sesudah diprivatisasi. Dari uraian

tersebut saya menduga bahwa bila kepemilikan non pemerintah pada BUMN semakin besar, maka kinerja keuangan BUMN sesudah diprivatisasi semakin meningkat.

Penelitian lanjutan dari Meggison, D'Souza dan Nash (2005) juga menunjukkan bahwa privatisasi BUMN telah mampu membangun praktek GCG yang lebih baik yang pada akhirnya mampu membuat kinerja lebih baik. Kecenderungan utama setelah privatisasi adalah perubahan kepemilikan (ownership), dimana semakin besar saham pemerintah dilepaskan maka manajemen perusahaan lebih leluasa dan lebih fokus pada tujuan profit maximization. Apabila privatisasi dilakukan dipasar modal maka kewajiban transparansi dan disclosure harus dilakukan sehingga GCG akan semakin kuat.

Privatisasi BUMN, secara umum ditujukan untuk meningkatkan good corporate governance. Sementara itu sebagaimana dalam kajian teori bahwa good corporate governance merupakan penggerak kinerja. Menurut Purwoko (2002), bahwa struktur kepemilikan yang sebagian kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah, dimana komposisi non pemerintah lebih besar ternyata dapat mendorong terciptanya suatu *good corporate governance* dan kinerja perusahaan, sebaliknya jika komposisi kepemilikan pemerintah yang masih besar maka dapat menghalangi jalannya *good corporate governance* (Ilya ; 2006).

Mitton et, al (2000), menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* mempunyai dampak yang kuat terhadap kinerja perusahaan selama periode krisis di Asia timur. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Klapper dan Love (2002) bahwa adanya hubungan positif antara *Good Corporate Governance* dengan kinerja perusahaan. Sama halnya penelitian yang dilakuakn shleiver dan vishny (2007) yang mendukung bahwa good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA, ROI dan NPM. Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja perusahaan akan semakin kuat dinegara berkembang dibanding dengan negara maju. Durnev dan Kim (2002) memberikan bukti bahwa praktik good corporate governance lebih bervariasi dinegara yang memiliki lingkungan hukum yang lemah.

#### Hipotesis penelitian

Berdasarkan kajian teori, penelitian empiris dan kerangka pikir maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

- Struktur kepemilikan dan *good corporate governance* berpengaruh secara simultan terhadap kinerja BUMN
- Struktur kepemilikan dan *good corporate governance* berpengaruh secara parsial terhadap kinerja BUMN

## METODE PENELITIAN

### Metode yang Digunakan

Objek dalam penelitian ini adalah Struktur kepemilikan, *Good Corporate Governance* dan kinerja keuanagn Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan unit analisis dalam penelitian ini yaitu Badan Usaha Milik Negara yang berkantor pusat di Jawa Barat pada periode 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah verivikatif yang dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik yaitu *Regresi*.

### Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu struktur kepemilikan ( $X_1$ ), *Good Corporate Governance* ( $X_2$ ) dan variabel dependen yaitu kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (Y). Indikator struktur kepemilikan adalah persentase kepemilikan publik (non pemerintah) pada perusahaan BUMN. Sedangkan GCG ditunjukkan oleh pelaksanaan prinsip prinsip GCG yang meliputi *transparansy*, *Accountability*, *Fairness*, *Independency*, dan *responsibility*. Selanjutnya kinerrja keuangan BUMN di ukur dengan menggunakan rasio *Return On Equity* (ROE), *Return on asset* (ROA) dan *Net Profit Margin* (NPM). Populasi dalam penelitian ini yaitu BUMN yang berpusat di Jawa Barat yang telah melakukan privatisasi sampai periode 2009 yang berjumlah sebanyak 6 BUMN.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Gambaran Data Tanggapan Responden

Khusus untuk data hasil kuesioner, agar lebih mudah dalam menginterpretasikan data hasil tanggapan responden yang sudah terkumpul, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden (Sugiyono, 2009) yaitu berdasarkan persentase skor jawaban responden dengan rumus sebagai berikut.

$$\% \text{ Skor} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}}$$

Selanjutnya persentase skor jawaban responden yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan rentang persentase skor maksimum (5/5 =100%) dan skor minimum (1/5 = 20%). Analisis deskriptif dilakukan

mengacu kepada setiap indikator yang ada pada setiap variabel yang diteliti dengan berpedoman pada tabel berikut.

Tabel 4.1  
Kriteria Pengklasifikasian Presentase Skor Tanggapan Responden

| No. | % Jumlah Skor   | Kriteria                  |
|-----|-----------------|---------------------------|
| 1   | 20.00% – 36.00% | Tidak Baik/Sangat Rendah  |
| 2   | 36.01% – 52.00% | Kurang Baik/Rendah        |
| 3   | 52.01% – 68.00% | Cukup Baik/Cukup Tinggi   |
| 4   | 68.01% – 84.00% | Baik/Tinggi               |
| 5   | 84.01% – 100%   | Sangat Baik/Sangat Tinggi |

#### Gambaran Data Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan pihak-pihak yang memiliki saham dari suatu perusahaan. Struktur kepemilikan diukur dari persentase kepemilikan publik (non pemerintah) pada perusahaan BUMN yang go publik dan berkantor pusat di Jawa Barat. Berikut persentase kepemilikan publik pada masing-masing perusahaan BUMN yang go publik dan berkantor pusat di Jawa Barat.

Tabel 4.2  
Struktur Kepemilikan Publik

| No | Perusahaan            | Kepemilikan Publik |
|----|-----------------------|--------------------|
| 1  | Kimia Farma           | 10.0%              |
| 2  | Indofarma             | 19.3%              |
| 3  | Aneka Tambang         | 35.0%              |
| 4  | Perusahaan Gas Negara | 44.8%              |
| 5  | Telkom                | 48.8%              |
| 6  | Adhi Karya            | 49.0%              |

Diantara keenam perusahaan, struktur kepemilikan publik terbesar pada PT.Adhi karya,tbk dan PT.Telekomunikasi Indonesia,tbk, yaitu mencapai 49%. sebaliknya kepemilikan publik terkecil pada PT.Kimia Farma, tbk dan PT.Indofarma.

#### Gambaran Data Pelaksanaan Good Corporate Governance

Pelaksanaan *good corporate governance* pada perusahaan BUMN akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner yang mencakup beberapa indikator. Pelaksanaan *good corporate governance* diukur menggunakan 5 indikator dan dioperasionalkan menjadi 16 butir pernyataan. Berikut disajikan persentase skor tanggapan responden terhadap setiap indikator pelaksanaan *good corporate governance*.

Tabel 4.3  
Rekapitulasi Persentase Skor Tanggapan Responden  
Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

| No | Indikator      | Skor Aktual | Skor Ideal | % Skor       | Kriteria     |
|----|----------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| 1  | Transparansi   | 59          | 90         | 65.6%        | Cukup tinggi |
| 2  | Akuntabilitas  | 65          | 90         | 72.2%        | Tinggi       |
| 3  | Fairness       | 89          | 120        | 74.2%        | Tinggi       |
| 4  | Responsibility | 86          | 120        | 71.7%        | Tinggi       |
| 5  | Independensi   | 33          | 60         | 55.0%        | Cukup tinggi |
|    | <b>Total</b>   | <b>332</b>  | <b>480</b> | <b>69.2%</b> | <b>Baik</b>  |

Secara keseluruhan pelaksanaan *good corporate governance* pada perusahaan BUMN yang go publik dan berkantor pusat di Jawa Barat sudah baik. Data ini mencerminkan bahwa pelaksanaan *good corporate governance* pada sebagian besar perusahaan BUMN yang go publik dan berkantor pusat di Jawa Barat sudah baik.

Baiknya pelaksanaan *good corporate governance* pada sebagian besar perusahaan tersebut dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain :

##### a. Tranparansi (*Tranparancy*)

Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan, yang diukur dari penyampaian informasi yang lengkap dan akurat, memberikan informasi yang sama kepada semua pemangku kepentingan dan mempublikasikan laporan keuangan lewat media. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa transparansi masuk kategori cukup tinggi, pada sebagian perusahaan informasi yang

disampaikan masih kurang lengkap dan akurat serta belum tepat waktu. Selain itu informasi diberikan masih agak berbeda kepada semua pemangku kepentingan serta laporan keuangan dan analisa manajemen tidak selalu dibagikan kepada para pemegang saham, dan selalu diterbitkan di internet.

**b. Akuntabilitas (*accountability*)**

Yaitu kejelasan adanya fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Efektifnya prinsip ini dapat dilihat dari adanya pedoman *corporate governance* tertulis dan rinci mengenai fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban setiap organ perusahaan (pemangku kepentingan), adanya sistem evaluasi dan monitoring serta sistem *reward and punishment* terhadap setiap pekerjaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akuntabilitas masuk kategori tinggi, sebagian besar perusahaan memiliki pedoman *Corporate Governance* tertulis dan cukup rinci mengenai hak fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap organ perusahaan. Selain itu sebagian besar perusahaan sudah menerapkan sistem *reward and punishment* dan para karyawan dan manajemen pada sebagian besar perusahaan secara berkala diminta menegaskan secara tertulis bahwa mereka taat pada *Code of Conduct*.

**c. Fairness (keadilan)**

yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak stakeholders yang timbul berdasarkan penggajian dan peraturan serta perundang-undangan. Efektifnya suatu kewajiban, dapat dilihat dari adanya perlindungan terhadap hak stakeholder sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan diberikan hak untuk mendapat informasi yang relevan bagi stakeholder, memberikan keleluasaan bagi stakeholder untuk memberikan pendapatnya serta memposisikan para pemegang saham untuk memiliki kedudukan yang setara dalam perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *fairness* masuk kategori tinggi, pada sebagian besar perusahaan hak stakeholder dilindungi secara adil sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga dengan informasi, pada sebagian besar perusahaan setiap stakeholder (primer dan sekunder), mendapat informasi yang relevan. Para stakeholder juga diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya dan para pemegang saham memiliki kedudukan yang setara dalam perusahaannya.

**d. Responsibility (pertanggungjawaban)**

*Responsibility* yaitu merupakan kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan-perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Pertanggungjawaban ini dapat dilihat dari adanya ketaatan manajemen terhadap hukum dan peraturan yang berlaku meliputi pertanggungjawaban manajemen terhadap *Corporate Social Responsibility*, keadilan bagi semua pemangku kepentingan dan memberikan laporan keuangan dan non keuangan kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *responsibility* masuk kategori tinggi, manajemen perusahaan pada umumnya sudah taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta cukup sering melakukan *Corporate Social Responsibility*. Manajemen mayoritas mempunyai tanggungjawab atas tindakan keadilan yang dilakukan, jika ada ketidakadilan maka selalu menerima konsekwensinya. Mengenai informasi, informasi non keuangan dan keuangan perusahaan sebagian besar sudah disediakan kepada pihak yang berwenang untuk membuat keputusan berinvestasi khususnya dalam hal informasi yang tepat dan dapat dipercaya, disampaikan tepat waktu dan diberikan untuk menunjukkan perbandingan

**e. Independency**

*Independency* yaitu suatu keadaan dimana para pengelola dalam mengambil keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan. Dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tatakelola yang baik. Pelaksanaan prinsip ini dapat dilihat dari adanya standar profesional sebagai landasan personal di perusahaan dan tidak adanya tekanan atau benturan kepentingan pihak manapun. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa independensi masuk kategori cukup tinggi, pada umumnya perusahaan memiliki standar profesional sebagai landasan personal di perusahaan tetapi belum begitu lengkap. Kemudian aktivitas-aktivitas dalam perusahaan, kadang-kadang masih terdapat tekanan atau benturan kepentingan pihak manapun yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan prinsip korporasi.

**Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Pelaksanaan Good Corporate Governance secara simultan Terhadap Kinerja Keuangan.**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa struktur kepemilikan dan *good corporate governance* berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan BUMN go publik yang berkantor pusat di Jawa Barat. Besarnya pengaruh secara simultan struktur kepemilikan dan pelaksanaan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan BUMN yang go publik dan berkantor pusat di Jawa Barat sebesar 78,3%. Hal ini mempunyai arti bahwa secara bersama-sama variabel struktur kepemilikan dan pelaksanaan *good corporate governance* memberikan kontribusi sebesar 78,3% terhadap kinerja keuangan pada perusahaan BUMN yang go publik dan berkantor pusat di Jawa Barat, sedangkan sisanya sebesar 21,7% merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti.

Selanjutnya dengan menggunakan analisis statistic regresi berganda diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -36,281 + 0,188 X_1 + 16,661 X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi diketahui bahwa struktur kepemilikan memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pada BUMN yang go publik dan berkantor pusat di Jawa Barat. Artinya jika skor struktur kepemilikan publik meningkat sebesar satu satuan maka kinerja keuangan BUMN akan meningkat sebesar nilai koefisien regresinya yaitu sebesar 0,188 % dengan anggapan variabel bebas lainnya tetap. Demikian juga dengan variabel pelaksanaan *good corporate governance*, memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pada BUMN. Artinya jika pelaksanaan *good corporate governance* meningkat sebesar satu satuan maka kinerja keuangan BUMN akan meningkat sebesar nilai koefisien regresinya yaitu sebesar 16,66% dengan anggapan variabel bebas lainnya tetap.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, struktur kepemilikan publik yang semakin besar atau dengan semakin besar pemerintah melepaskan kepemilikannya pada BUMN maka kinerja keuangan BUMN akan semakin meningkat. Dengan semakin besar saham pemerintah dilepaskan maka manajemen perusahaan lebih leluasa dan lebih fokus pada tujuan profit maximization. Apabila privatisasi dilakukan dipasar modal maka perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan transparansi dan disclosure. Dengan demikian perusahaan dituntut untuk melaksanakan *good corporate governance*. Berdasarkan hasil penelitian terlihat ada pengaruh positif dimana dengan pelaksanaan GCG yang baik maka akan meningkatkan kinerja BUMN.

#### **Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Pelaksanaan Good Corporate Governance secara parsial Terhadap Kinerja Keuangan.**

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh kesimpulan bahwa struktur kepemilikan publik mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BUMN go publik yang berkantor pusat di Jawa Barat. hal ini berarti jika kepemilikan pemerintah semakin kecil atau pemerintah semakin besar melepaskan kepemilikan sahamnya maka kinerja keuangan BUMN akan semakin baik. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh D'Souza dan Megginson (1998), Boubakri dan Cosset (1998), Eckel, Eckel, dan Singal (1997), dan Megginson, Nash, dan Van Randerborgh (1994), bahwa efisiensi yang sangat signifikan pada BUMN sesudah privatisasi hanya terjadi bila kepemilikan pemerintah pada BUMN semakin berkurang.

Pelaksanaan *good corporate governance* juga mempengaruhi kinerja keuangan BUMN go publik yang berkantor pusat di Jawa Barat. hal ini mengindikasikan bahwa dengan semakin baik pelaksanaan GCG maka akan mendorong peningkatan kinerja keuangan BUMN. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh *Mitton et, al* (2000), *Klapper* dan *Love* (2002) dan *Shleiver* dan *vishny* (2007) yang menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara *Good Corporate Governance* dengan kinerja perusahaan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Struktur kepemilikan dan *good corporate governance* secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BUMN go publik yang berkantor pusat di Jawa Barat dengan pengaruh sebesar 78,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan BUMN dapat dilakukan dengan melepaskan sebagian kepemilikan saham pemerintah kepada publik dan meningkatkan pelaksanaan *good corporate governance* dengan baik. Dengan demikian, diharapkan BUMN akan lebih fokus pada pencapaian profit dan peningkatan efisiensi operasi BUMN.
2. Struktur kepemilikan dan *good corporate governance* masing masing secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMN go publik yang berkantor pusat di Jawa Barat.
  - a. Struktur kepemilikan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian empiris D'Souza dan Megginson (1998), Boubakri dan Cosset (1998), Eckel, Eckel, dan Singal (1997) dan Megginson, Nash dan Randenborgh (1994) yang melaporkan bahwa semakin berkurang kepemilikan pemerintah pada BUMN semakin meningkat secara signifikan kinerja profitabilitas dan efisiensi BUMN tersebut.
  - b. Pelaksanaan *good corporate governance* mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian *Mitton et, al* (2000), *Klapper* dan *Love* (2002), *Shleiver* dan *Vishny* (2007) yang menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* mempunyai dampak yang kuat terhadap kinerja perusahaan yang mendukung bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA, ROI dan NPM.

### **Saran**

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan peneliti dari hasil penelitian ini

1. Salah satu faktor untuk meningkatkan kinerja keuangan BUMN yaitu harus adanya komitmen yang kuat dari pihak stakeholder dan manajemen untuk mewujudkan *good corporate governance*. Dengan

demikian disarankan bagi BUMN yang masih lemah kinerja keuangannya dapat meningkatkan pelaksanaan *good corporate governance* secara optimal.

2. Isu privatisasi, khususnya pada negara berkembang memunculkan pro dan kontra, hal ini harus disikapi bahwa pelepasan kepemilikan pemerintah kepada publik dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan serta memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat
3. Hasil penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan dalam menggunakan faktor faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan BUMN sehingga kemungkinan masih ada faktor lain selain struktur kepemilikan dan GCG yang dapat diteliti lebih lanjut. Faktor lain menurut hemat peneliti antara lain faktor pergantian CEO BUMN dan Budaya organisasi perusahaan.
4. Variable struktur kepemilikan dalam penelitian ini diprosikan dengan dengan kepemilikan publik (non pemerintah). Untuk penelitian lebih lanjut, variable struktur kepemilikan dapat dikembangkan dengan mengelompokkan stuktur kepemilikan dalam beberapa kategori yaitu kepemilikan asing, kepemilikan manajemen dan kepemilikan institutional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Syakhroza, 2005, *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori Model dan Sistem Governance Serta Aplikasi pada BUMN*. Penerbit FE.UI
- Boubakri, Narjes and Jean Claude Cosset, 1999 : *The Financial and Operating Performance of Newly Privatized Firm, Evidence From Developing Countries*, Mimeo Universite
- D. Sauza, Juliet and Megginson, William and Nash Robert, 2001 : *Determinants of Performance Improvement in Privatized Firm, The Role of Restructuring and Corporate Governance*, Paper, The University of Oklahoma, Norman
- Ilya Avianti, 2006, *Privatisasi BUMN dan Penegakan Good Corporate Governance dan Kinerja BUMN*, Jurnal Kinerja, Volume 10, No.1, Thn 2006 : Hal 57-56
- Indra Bastian, 2002, *Privatisasi di Indonesia*, Penerbit Salemba Empat
- Ishak Rafick dan Baso Amir, 2010, *BUMN Expose*, Ufuk Publishing House, Jakarta
- Laporan Kinerja BUMN, 2003 – 2007, Kementrian Badan Usaha Milik Negara
- Meginson , William, Robert Nash and Mathias Van Radenborg, 1994 *The Financial and Operating Performance of New Privatization Firm : An Internasional Empirical Analysis* J.Fin 49.pp 403-452
- Milton, Harris dan Arthur Raviv, 2000 “*The Theory of Capital Struktur*” Journal of Finance, Vol 46 No.1
- National Committee on Governance, 2006 *Indonesian Code Of Good Corporate Governance*.  
<http://www.governanceIndonesia.or.id>
- Organization For Economic Cooperation and Development (OECD). 2004, *Principles of Good Corporate Governance*
- Pandu Patriadi, 2003, *Studi Banding Kebijakan Privatisasi BUMN di Beberapa Negara*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol.7, No.4
- Purwoko , *Model Privatisasi BUMN yang Mendatangkan Manfaat Bagi pemerintah Dan masyarakat Indonesia* ,Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 6 No 1, Maret 2002
- Sekaran Uma, 2006, *Research Methods For Business*, John Wiley & Sons, Inc New York.
- Shleifer and Vishny, 1996, *agency Conflict in Public and Negotiated Transfer of Corporate Control*, The Journal of Finance, Vol LV., No.2
- Sukrisno Agoes, 2009, *Etika Bisnis dan Profesi*, Penerbit Salemba Empat
- Sugiharto dkk (2008), *BUMN Indonesia (Isu Kebijakan dan Strategi)*, Jakarta PT.Elex Media Komputindo
- Suyanto , 2007, *Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Atas kinerja BUMN di Indonesia*. Jurnal Akuntabilitas, Maret 2007.
- Simon Johnson and Andei Shleifer, *Privatization and Corporate Governance, Prepared for The Annual East Seminar on Economic*, 1000, pp 28-30
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung Alfabeth
- Wahidahwati (2002), *Pengaruh kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institutional pada Kebijakan Hutang perusahaan*, Sebuah persepektif Theory Agency. Jurnal Riset Akuntansi Vol 5 No.1 Januari 2000
- Wahyudin Zarkasyi, 2008, *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, perbankan, dan jasa keuangan lainnya*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Zaroni, 2004, *Pengaruh Kepemilikan pemerintah, Kepemilikan Asing, dan Pergantian CEO Terhadap Kinerja Keuangan BUMN*, SNA Denpasar Bali
- Kepmen BUMN, 2002. Penerapan *Praktik Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara KEP No.117/M/MBU/202 Tanggal 1 Agustus 2002
- Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep 100/MBU/2002, Tentang Penilaian Kesehatan BUMN
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor Kep 133/M-PBUMN/1999